

KEBIJAKAN *VOLKSCHOOL* DI HINDIA BELANDA TAHUN 1941-1946

(SKRIPSI)

Oleh:

Davina Maura Putri

2213033069



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRAK

KEBIJAKAN *VOLKSCHOOL* DI HINDIA BELANDA TAHUN 1941-1946

Oleh

DAVINA MAURA PUTRI

Kebijakan *Volkschool* merupakan kebijakan pendidikan dasar yang diterapkan di Hindia Belanda bagi masyarakat pribumi. Kebijakan ini memiliki peran penting dalam perluasan pendidikan rakyat pada masa akhir pemerintahan kolonial, awal pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan *Volkschool* serta dampaknya terhadap perkembangan pendidikan rakyat di Indonesia pada periode 1941-1946.

Metode penelitian yang digunakan dengan melalui pendekatan historis dengan menggunakan teori gerak sejarah yang menegaskan kebijakan *Volkschool* Tahun 1941-1946. Tahapan penelitian meliputi heuristik sebagai tahapan awal dalam fokus pada pencarian pengumpulan sumber primer yaitu pengumpulan arsip dan sumber sekunder yang berupa buku dan jurnal, kritik sumber sebagai proses analisis terhadap sumber yang di dapatkan untuk menentukan keasliannya, interpretasi sebagai tahapan dimana sumber yang di dapatkan dikritik dan dijadikan narasi, dan historiografi yaitu tahapan akhir untuk membuat penulisan penelitian sejarah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan *Volkschool* mengalami perubahan dalam struktur pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar dan tujuan pendidikan sesuai kepentingan pemerintah yang berkuasa. Kebijakan tersebut turut memperluas akses pendidikan bagi masyarakat pribumi serta berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan kesadaran kebangsaan. Kesimpulannya, *Volkschool* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendidikan kolonial, tetapi juga menjadi bagian dari proses transformasi pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan dasar pendidikan nasional Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Kata Kunci: *Volkschool*, Kolonial, Kebijakan, dan Transformasi.

ABSTRACT

THE VOLKSCHOOL POLICY IN THE DUTCH EAST INDIES FROM 1941-1946

By

DAVINA MAURA PUTRI

Volkschool policy is a basic education policy applied in the Dutch East Indies for indigenous people. This policy has an important role in the expansion of people's education at the end of colonial rule, the beginning of the Japanese occupation until the beginning of Indonesia's independence. This research aims to analyze the Volkschool policy and its impact on the development of public education in Indonesia in the 1941-1946 period. The research method used through a historical approach by using the theory of historical movement that confirms the Volkschool policy of 1941-1946. The stages of research include heuristics as the initial stage in focusing on the search for primary source collection, namely the collection of archives and secondary sources in the form of books and journals, source criticism as a process of analysis of the sources obtained to determine their authenticity, interpretation as a stage where the source obtained is criticized and made into a narrative, and historiography which is the final stage to make historical research writing. The research results show that the Volkschool policy has undergone changes in the structure of education, curriculum, language of instruction and educational objectives according to the interests of the government in power. The policy also expands access to education for indigenous people and contributes to increasing literacy and national awareness. In conclusion, Volkschool not only functions as an instrument of colonial education, but also becomes part of the educational transformation process that contributes to the formation of the foundation of Indonesian national education in the early

KEBIJAKAN *VOLKSCHOOL* DI HINDIA BELANDA TAHUN 1941-1946

Oleh

DAVINA MAURA PUTRI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

: **KEBIJAKAN *VOLKSCHOOL* DI HINDIA BELANDA
TAHUN 1941-1946**

Nama Mahasiswa

: **Davina Maura Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2213033069**

Jurusan

: **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Program Studi

: **Pendidikan Sejarah**

Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

1. MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



**Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199310262019031009**

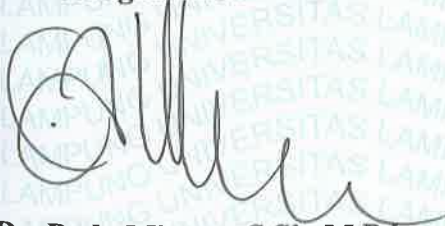
Pembimbing II



**Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199007212019032020**

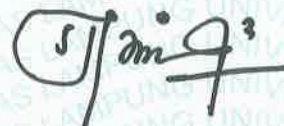
2. MENGETAHUI

**Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial.**



**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP. 197411082005011003**

**Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,**

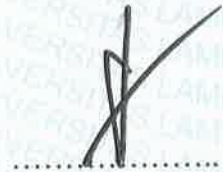


**Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum
NIP. 197009132008122002**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.

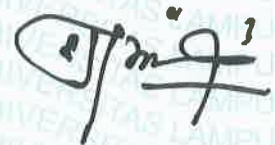


Sekretaris : Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing : Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.
NIP. 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Davina Maura Putri

NPM : 2213033069

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Universitas Lampung

Alamat : Perumahan Bumi Bahtera Indah, Campang Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis untuk diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juni 2026



Davina Maura Putri

NPM. 2213033069

RIWAYAT HIDUP



Davina Maura Putri lahir pada tanggal 25 Mei 2005 di Teluk Betung. Putri dari pasangan Bapak Yoyok Pudjo Satriyo (alm) dan Ibu Iir Lina Yanti, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Bertempat tinggal di Campang Raya, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pendidikan yang pernah di tempuh yaitu Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Bumi Waras Bandar Lampung pada Tahun 2010 sampai Tahun 2013, kemudian pindah ke SD Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung dan lulus Tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke MTS Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2019, meneruskan Pendidikan ke MAN 1 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2022. Kemudian penulis tercatat sebagai Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Lampung pada Tahun 2022, dengan masuk melalui Jalur SBMPTN. Pada semester V penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Rejo Sakti kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, dan menjalani program Pengenalan Lapang Pesekolahan (PLP) di SMK MMT Penawar Aji. Penulis juga pernah menjadi Sekretaris Bidang BPOK FOKMA 2025. Dengan mempunyai keinginan kuliah tepat waktu dan keyakinan yang sangat tinggi, Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur dan bangga terhadap selesai nya skripsi ini yang berjudul “Kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda Tahun 1941-1946”.

MOTTO

*“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S Asy-Syarah 5-6)

*“Lakukan apa yang kau mau, sekarang, saat hatimu bergerak, jangan kau larang.
Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarah maknanya seorang”*

(Hindia)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

-Davina

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpah rahmat, hidayah dan karunia-nya yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik sepanjang masa.

Dengan rasa syukur, SKRIPSI ini saya persembahkan untuk kedua orangtuaku Ayah Indera Suherman dan Mami Iir Lina Yanti. Terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada orangtuaku tercinta yang selalu menjadi salah satu sumber kekuatan, doa dan kasih sayang yang tak pernah putus.

Tanpa dukungan moril dan materil dari kalian perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin saya lalui. Segala doa dan pengorbanan kalian menjadi semangat terbesar dalam setiap langkah perjuanganku.

Untuk Almamaterku Tercinta
“UNIVERSITAS LAMPUNG”

SANWACANA

Allhamdulillahirobbil'aalamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi yang berjudul **“Kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda Tahun 1941-1946”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Lampung, sekaligus dosen Pembahas Skripsi penulis. Terimakasih Ibu untuk kepedulian, didikan, serta arahan yang ibu

kasih ke penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi sampai dengan tahapan ini, terimakasih ibu telah membimbing selama penulis menjadi Mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.

7. Bapak Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd., Selaku dosen Pembimbing Akademik dan dosen Pembimbing I Skripsi penulis, Terimakasih banyak bapak untuk segala didikan dan arahan serta membimbing selama penulis menjadi Mahasiswa di Program studi Pendidikan Sejarah.
8. Ibu Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., Selaku dosen Pembimbing II Skripsi penulis, terimakasih banyak untuk kepedulian, didikan serta arahan yang ibu beri ke penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi sampai dengan tahapan ini, terimakasih telah membimbing selama penulis menjadi Mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Terimakasih kepada bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, dan para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
10. Teruntuk Adikku tersayang Keisha Ajeng Kanaya, terimakasih sudah memberikan dukungan serta mendoakan penulis sampai dengan saat ini.
11. Teruntuk Keluarga besarku Nenek, Mbah, Datuk, Akung, tante, om, dan sepupuku yang tak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas dukungan dan doa untuk penulis hingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
12. Teruntuk Sahabat dekatku Kel H. Effendi Chitra Qhailila, Rachel Maryam A.W, Jesyca Amalia Sukma Islami, Yusa Alkayyis, Olsen Agustinus Simorangkir, Revangga Wiratama, Beni Izha Mahendra, berjuta-juta terimakasih untuk untukku kepada kalian, terimakasih untuk menemani proses skripsi, untuk selalu ada dalam susah maupun senang, terimakasih karena sudah menjadi teman, sahabat, rumah, selama masa perkuliahan.
13. Teruntuk Sahabat dekatku Cupapi Munyenyoy, Aisyah Permata Islami, Alya Nurlaila, dan Lutfiah Dwi Sanrani, karena sudah berjuang bersama sejak SMA

hingga saat ini, terimakasih sudah menemani penulis selama 7 tahun baik senang maupun susah.

14. Teruntuk Sahabat dekatku semasa SMA hingga saat ini Dhiya Ulhaq Riyan Putri, Erika Wulandari, dan Devi Agustia, terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, dan orang yang selalu ada saat penulis merasa senang maupun susah.
15. Terimakasih untuk teman mainku saat dirumah, Putri Indriyani, yang telah mensupport, menemani penulis disaat senang maupun sedih.
16. Teruntuk teman-teman KKN Desa Gedung Rejo Sakti, Terimakasih untuk semua kenangan, pengalaman, suka duka selama KKN hingga sekarang, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian
17. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Sejarah angkatan 2022, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan selama masa kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
18. Dan yang terakhir Davina Maura Putri, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan hingga ke titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri. Tetaplah menjadi manusia yang tak pernah lelah untuk mencoba dan tidak kenal putus asa. *Oh god, I really proud of this achievement!*

Semoga hasil Penulisan penelitian ini akan dapat berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan maaf untuk semua yang sudah berkontribusi di kehidupan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan keberkahan atas semua yang kalian berikan.

Bandar Lampung, Juni 2026

Davina Maura Putri
NPM. 2213033069

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Berpikir.....	5
1.6. Paradigma Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1. Konsep Kebijakan.....	8
2.1.2. Konsep <i>Volkschool</i>	9
2.1.3. Konsep Hindia Belanda.....	11
2.1.4. Teori Gerak Sejarah.....	14
2.2. Penelitian Terdahulu.....	10
III. METODE PENELITIAN.....	12
3.1. Ruang Lingkup.....	12
3.2. Metode Penelitian.....	12
3.2.1. Heuristik.....	19
3.2.2. Kritik Sumber.....	23
3.2.3. Interpretasi.....	24
3.2.4. Historiografi.....	24
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.4. Teknik Analisis Data.....	20
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Deskripsi Data.....	29
4.1.1. Kebijakan <i>Volkschool</i> di Hindia Belanda Tahun 1941-1946.....	29

4.2. Pembahasan.....	80
4.2.1. Kebijakan <i>Volkschool</i> di Hindia Belanda Tahun 1941-1946.....	80
4.2.1.1. Kebijakan <i>Volkschool</i> di Hindia Belanda Tahun 1941 (Masa Akhir Pemerintah Belanda).....	71
4.2.1.2. Kebijakan <i>Volkschool</i> di Hindia Belanda Tahun 1942-1944 (Pendudukan Jepang).....	85
4.2.1.3. Kebijakan <i>Volkschool</i> di Hindia Belanda Tahun 1945-1946 (Awal Kemerdekaan).....	92
4.2.1. Dampak Kebijakan <i>Volkschool</i> Bagi Pendidikan	98
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.1 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1....Peta Posisi <i>Volkschool</i> Dalam Sistem Pendidikan Kolonial.....	38
2....Arsip Surat Kabar Penataan Kota Yang Melibatkan <i>Volkschool</i> Tahun 1941.....	39
3....Arsip Surat Kabar Perpindahan Dan Penugasan Guru Oleh Pemerintah Kolonial Pada Tahun 1941.....	40
4....Arsip Buku Penjelasan Pengajaran Bahasa <i>Volkschool</i> Tahun 1941.....	41
5.... <i>Volkschool</i> Menjadi Dasar Untuk Melanjutkan Ke Pendidikan Kejuruan Untuk Membentuk Tenaga Kerja Pribumi.....	42
6....Arsip Tentang Rencana Menjadikan <i>Volkschool</i> Sebagai Sekolah Delapan Tahun 1941.....	43
7....Perubahan Nama Dan Bahasa Nippon.....	44
8....Pelajaran Bahasa Nippon.....	45
9....Pemberitahuan Dilarang Pakai Bahasa Belanda.....	46
10..Pemberitahuan Sekolah Pertukangan.....	47
11..Pembukaan Lapangan Pendidikan.....	48
12..Sekolah Guru Perempuan.....	49
13..Pembukaan Sekolah-Sekolah.....	50
14..Aturan Sekolah Pertukangan.....	51
15..Pemberitahuan Sekolah Yang Sudah Dibuka.....	52
16..50.000 Orang Menuntut Ilmu Pengetahuan.....	53
17..Pendidikan Rakyat Diperluas.....	54
18..Kursus Bahasa Nippon Bagi Kaum Putri.....	55
19..Pemberantasan Buta Huruf.....	56
20..Memberantas Buta Huruf.....	57
21..Pemuda Pemudi Buta Huruf.....	58
22..Pembukaan Sekolah Bahasa Nippon.....	59
23..Pembukaan Sekolah-Sekolah Baru.....	60
24..Pendidikan Seluruh Jawa Maju Pesat.....	61
25..Siaran Pendidikan Rakyat Dari Radio Jakarta.....	62

26.. Memperluas Sekolah-Sekolah.....	63
27.. Ujian Menjadi Guru-Guru Dan Guru Bantu.....	64
28.. Usaha Memperbaiki Nasib Guru-Guru Sekolah Rakyat.....	65
29.. Pertandingan Bahasa Nippon.....	66
30.. Pendidikan Pertama Dan Menengah Diperkuat.....	67
31.. Peraturan Sekolah Rakyat.....	68
32.. Satu Setengah Juta Murid Akan Dikerahkan Untuk Pertanian.....	69
33.. Kewajiban Guru Dimasa Perang.....	70
34.. Maklumat Sekolah Partikelir.....	71
35.. <i>Volks Universiteit</i> Di Boeka.....	74
36.. Panggilan Tenaga Guru.....	75
37.. Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Para Psikologi.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1....Surat Izin Penelitian.....	112
2....Peta Mengenai Posisi <i>Volkschool</i> Dalam Sistem Pendidikan Kolonial.....	113
3....Arsip Surat Kabar Penataan Kota yang Melibatkan <i>Volkschool</i> 1941.....	114
4....Arsip Surat Kabar Perpindahan dan Penguasaan Guru oleh pemerintah kolonial pada tahun 1941.....	115
5....Arsip Buku Penjelasan Pengajaran Bahasa di <i>Volkschool</i> Tahun 1941.....	116
6....Surat Kabar <i>Volkschool</i> menjadi dasar untuk melanjutkan ke Pendidikan Kejuruan untuk membentuk tenaga pribumi	117
7....Arsip Tentang Rencana Menjadi <i>Volkshool</i> Sebagai Sekolah Depalan Tahun 1941.....	118
8....Arsip Perubahan Nama dalam Bahasa Nippon.....	119
9....Arsip Pelajaran Bahasa Nippon.....	120
10..Arsip Pemberitahuan dilarang pakai bahasa Belanda	121
11..Surat Kabar mengenai Pemberitahuan Sekolah Pertukangan.....	122
12..Surat Kabar mengenai Lapangan Pendidikan dan Pelajaran.....	123
13..Surat Kabar Sekolah Guru Perempuan.....	124
14..Surat Kabar Pembukaan Sekolah-Sekolah.....	125
15..Surat Kabar Tentang Arturan Sekolah Pertukangan.....	126
16..Surat Kabar mengenai Pemberitahuan Sekolah yang Sudah Dibuka.....	127
17..Surat Kabar mengenai 50.00 orang menuntut Ilmu Pengetahuan.....	128
18..Surat Kabar mengenai Pendidikan Rakyat diperluas.....	129
19..Surat Kabar mengenai Kursus Bahasa Nippon untuk Kaum Putri.....	130
20..Surat Kabar mengenai Pemberantasan Buta Huruf.....	131
21..Surat Kabar mengenai meberantas buta Huruf.....	132
22..Surat Kabar mengenai Pemuda/Pemudi Buta Huruf.....	133
23..Surat Kabar mengenai Pembukaan Sekolah Bahasa Nippon.....	134
24..Surat Kabar mengenai Pembukaan Sekolah Sekolah Baru.....	135
25..Surat Kabar mengenai Pendidikan Seluruh Jawa maju pesat.....	136
26..Surat Kabar mengenai Siaran Pendidikan Rakyat dari Radio Jakarta.....	137

27.. Surat Kabar mengenai Pembukaan Sekolah Sekolah.....	138
28.. Surat Kabar mengenai Ujian menjadi guru-guru dan guru bantu.....	139
29.. Surat Kabar mengenai Usaha memperbaiki nasib guru-guru sekolah rakyat	140
30.. Surat Kabar mengenai Pertandingan Bahasa <i>Nippon</i>	141
31.. Surat Kabar mengenai Pendidikan Pertama dan Menengah diperkuat.....	142
32.. Surat Kabar tentang Peraturan sekolah rakyat.....	143
33.. Surat Kabar tentang satu setengah juta murid dikerahkan untuk pertanian...	144
34.. Surat Kabar mengenai Kewajiban guru dimasa perang.....	145
35.. Surat Kabar mengenai Maklumat sekolah partikelir.....	146
36.. Surat Kabar mengenai <i>Volks Universiteit</i> di buka.....	147
37.. Surat Kabar mengenai Panggilan tenaga guru.....	148
38.. Surat Kabar mengenai Pendidikan di tinjau dari sudut para psikologi.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Kebijakan Dan Implementasi <i>Volkschool</i> Di Hindia-Belanda Tahun 1941 (Masa Akhir Pemerintahan Belanda)	31
4.2 Kebijakan Dan Implementasi <i>Volkschool</i> di Hindia-Belanda Tahun 1942-1944 (Pendudukan Jepang).....	32
4.3 Kebijakan Dan Implementasi <i>Volkschool</i> di Hindia-Belanda Tahun 1945-1946 (Awal Kemerdekaan)	35
4.4 Klasifikasi Arsip Berdasarkan Aspek Pendidikan.....	77

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang dan kompleks sejak masa pra-kolonial hingga era modern. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara informal dan berbasis tradisi, melalui keluarga, komunitas, serta lembaga keagamaan. Pola pendidikan ini berfungsi menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual sesuai adat setempat. Masuknya kekuasaan kolonial, terutama Belanda, menyebabkan sistem pendidikan Indonesia mengalami perubahan besar menuju bentuk formal yang lebih terstruktur. Pendidikan modern tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat pribumi. Pendidikan itu berfungsi sebagai instrumen politik dan kontrol sosial oleh pemerintah kolonial (Suryadinata, 2010).

Dalam konteks Hindia Belanda, pendidikan sejak awal memiliki fungsi ganda yaitu memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, sekaligus memperkuat sistem sosial kolonial yang diskriminatif. Salah satu wujud nyata dari kebijakan ini adalah pendirian *Volkschool* atau sekolah rakyat, yang dirancang untuk memberi pendidikan dasar bagi anak-anak pribumi namun dengan tujuan utama mencetak tenaga kerja rendahan bagi kepentingan kolonial. Akses terhadap jenjang pendidikan lebih tinggi dibatasi, sementara kualitas pembelajaran di *Volkschool* rendah dan tidak merata (Ricklefs, 2008). Urgensi mengkaji periode 1941-1946 dalam konteks *Volkschool* terletak pada posisinya sebagai masa transisi kekuasaan yang paling dinamis dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pada masa ini, *Volkschool* melintasi tiga fase pemerintahan berbeda yaitu masa akhir kekuasaan Belanda (1941), pendudukan Jepang (1942-1945), hingga awal

berdirinya Republik Indonesia (1945-1946). Periode tersebut membuka ruang untuk menelusuri bagaimana kebijakan sistem pendidikan *Volkschool* pada transisi kekuasaan Belanda, Jepang, dan awal kemerdekaan. Permasalahan utama dalam penelitian tentang kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda berakar pada bentuk, pelaksanaan, serta penerimaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang dibangun di bawah kebijakan kolonial yang diskriminatif.

Kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda mendorong perluasan akses pendidikan ke berbagai daerah di Indonesia melalui pendirian sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi. Penerapan kebijakan tersebut memberikan dampak sosial yang cukup besar, salah satunya terhadap munculnya kesadaran dan pergerakan nasional di kalangan masyarakat pribumi (Ekwandari dkk., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kolonial tidak hanya menghasilkan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah Belanda, tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi sosial dan politik pada masa itu. Kebijakan pendidikan kolonial kemudian menjadi dasar berkembangnya sistem pendidikan bagi pribumi, termasuk lahirnya sekolah rakyat seperti *Volkschool* yang tetap diarahkan sesuai kepentingan praktis pemerintah kolonial.

Kurikulum *Volkschool* dirancang sederhana dan praktis. Selain itu, keterbatasan tenaga pengajar, minimnya fasilitas, serta ketimpangan kesempatan belajar memperburuk kualitas pendidikan. Meskipun demikian, semangat masyarakat pribumi untuk tetap mempertahankan proses belajar menunjukkan adanya kesadaran pentingnya pendidikan bagi kemajuan rakyat Indonesia. Permasalahan yang muncul dari konteks tersebut terletak pada pertentangan mendasar antara tujuan dan realitas *Volkschool*. Di satu sisi, sekolah ini digagas sebagai sarana pendidikan rakyat yang diharapkan mampu mencerdaskan anak-anak pribumi. Namun di sisi lain, sistem dan kurikulumnya justru digunakan

Sebagai alat politik kolonial yang mengekang kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang setara. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan struktural dalam akses, mutu, dan fungsi pendidikan dasar di Hindia Belanda. Penelitian ini memiliki arti penting untuk menelaah kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda pada Tahun 1941-1946. Penelitian ini juga mengkaji respons rakyat pribumi terhadap kebijakan tersebut. Secara kurikulum, *Volkschool* menekankan pelajaran dasar “calistung” yang mencakup membaca, menulis, dan berhitung. Materi lain meliputi pendidikan moral, sejarah Belanda versi kolonial, serta keterampilan vokasional berupa pertanian dan kerajinan. Kurikulum tersebut ditetapkan melalui keputusan Gubernur Jenderal. Pendekatan tersebut tidak memberikan ruang bagi pengembangan pemikiran kritis yang berpotensi mengganggu stabilitas kolonial (Nugroho, 2019).

Pendudukan Jepang di Indonesia pada Tahun 1942 membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan yaitu kurikulum diarahkan pada kepentingan propaganda serta pembentukan disiplin militer jasmani dan penanaman kesetiaan kepada Kaisar Jepang ditempatkan sebagai prioritas utama (Arum & Jasyusman, 2023). Masa pendudukan Jepang (1942-1945) menjadi titik balik bagi *Volkschool*. Pemerintah Jepang menutup seluruh sekolah Belanda dan menggantinya dengan sistem pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*). Kebijakan ini menghapus diskriminasi rasial dan menyeragamkan masa studi menjadi enam tahun (Suherman & Bastaman, 2021).

Sekolah Rakyat kemudian dimanfaatkan sebagai sarana propaganda militer, termasuk pengajaran semangat “*seishin kyoiku*” (pendidikan jiwa) dan perekrutan pemuda ke dalam PETA (Pembela Tanah Air) (Tanaka, 2019). Meskipun banyak sekolah rusak akibat perang dan kekurangan sumber daya, masa ini justru menumbuhkan semangat kebangsaan pada siswa dan guru pribumi (Susanto, 2022).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, sistem Sekolah Rakyat peninggalan

Jepang menjadi dasar bagi pembentukan sistem pendidikan nasional Indonesia. Gedung dan sekolah yang masih tersisa dimanfaatkan kembali, dan tenaga pendidik pribumi memainkan peran besar dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme serta kemandirian bangsa (Nugroho, 2019). *Volkschool* yang semula merupakan alat kolonial justru menjadi simbol perjuangan rakyat dalam mencerdaskan bangsa.

Secara keseluruhan, keberadaan *Volkschool* pada Tahun 1941-1946 mencerminkan ketangguhan sistem pendidikan dasar di tengah tekanan politik, diskriminasi sosial, serta campur tangan militer. Pembatasan melalui kurikulum yang manipulatif serta kondisi perang tidak menghilangkan kontribusi *Volkschool* terhadap peningkatan tingkat melek huruf di kalangan pribumi. Tingkat melek huruf meningkat dari 5% menjadi sekitar 15%. Peningkatan tersebut menjadi modal penting bagi perjuangan kemerdekaan (Sari, 2018). Kajian mengenai *Volkschool* memiliki arti penting untuk memahami perkembangan pendidikan rakyat dalam masa transisi kekuasaan kolonial. Lembaga tersebut berperan sebagai bagian dari proses pembentukan identitas nasional Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan *Volkschool* di Hindia-Belanda Tahun 1941-1946?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan *Volkschool* di Hindia-Belanda Tahun 1941-1946.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan *Volkschool* di Hindia-Belanda Tahun 1941-1946.

2. Secara Praktis

1. Bagi Universitas Lampung

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan pengembangan pengetahuan, khususnya mengenai kebijakan *Volkschool* di Hindia- Belanda Tahun 1941-1946.

2. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam menganalisa terkait dengan kebijakan *Volkschool* di Hindia-Belanda Tahun 1941-1946.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis akan kesejarahan yakni terkait dengan kebijakan *Volkschool* di Hindia-Belanda Tahun 1941-1946.

4. Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan akan salah satu sejarah, yaitu kebijakan *Volkschool* di Hindia-Belanda Tahun 1941-1946.

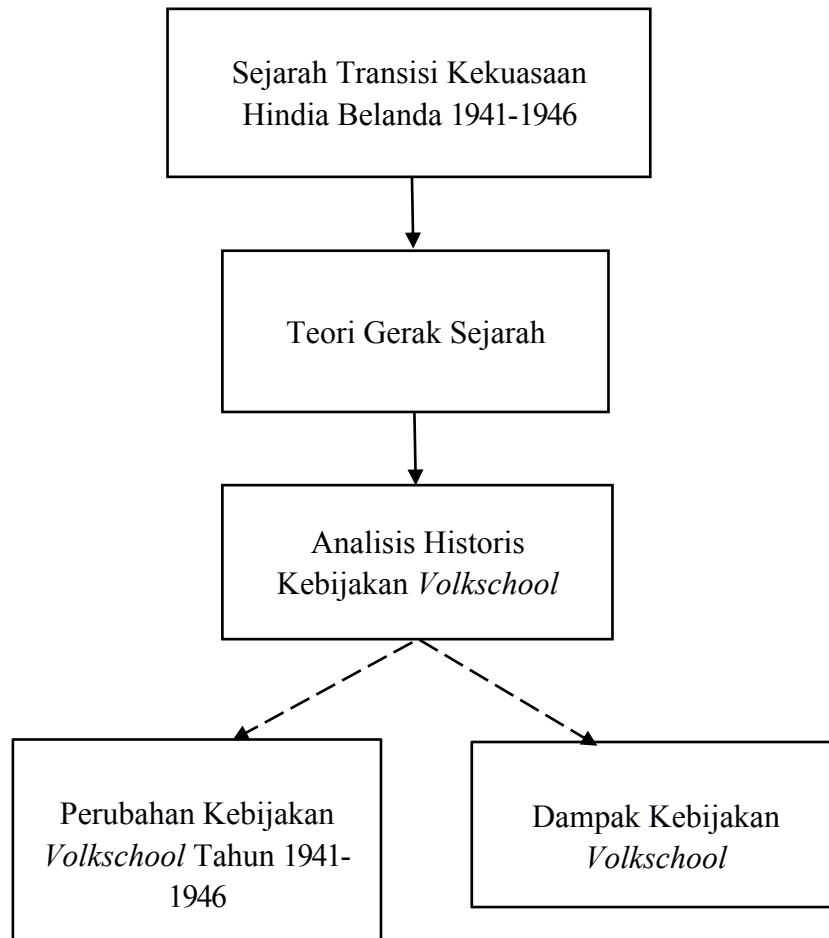
1.5. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan *Volkschool* (Sekolah Rakyat/Sekolah Desa) di Hindia Belanda, khususnya dalam kurun waktu 1941–1946. Periode ini dipilih karena merepresentasikan masa transisi kekuasaan yang drastis, dari akhir kolonial Belanda ke Pendudukan Jepang, dan kemudian awal-awal kemerdekaan. Fokus utama adalah mengidentifikasi bagaimana kebijakan lembaga pendidikan ini berubah di bawah transisi kekuasaan yang berbeda-beda. Pada rentang Tahun 1941–1946, kebijakan *Volkschool* tidak lagi menggunakan nama aslinya. Pasca-Pendudukan Jepang pada 1942, istilah *Volkschool* secara resmi dihapuskan dan diganti menjadi Kokumin Gakko (Sekolah Rakyat) sebagai bagian dari upaya asimilasi dan propaganda Jepang, meskipun fungsinya secara esensial tetap sebagai sekolah dasar tiga tahun.

Penelitian akan mengkaji implikasi perubahan nama ini apakah hanya sekadar penggantian nama atau mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan atau aturan publik terhadap sekolah tersebut. Perlu dianalisis juga bagaimana lembaga ini diakui dan dikelola pada awal masa Republik, khususnya setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Inti dari kebijakan sebuah sekolah terletak pada kurikulum dan tujuan pendidikannya. Kurikulum *Volkschool* di masa Belanda berorientasi pada keterampilan dasar (baca, tulis, hitung) dan bertujuan mencetak tenaga kerja tingkat rendah serta menjaga jarak sosial. Penelitian ini akan membandingkan kurikulum era *Volkschool* (sebelum 1942) dengan kurikulum Kokumin Gakko (1942–1945), di mana dominasi bahasa Jepang, indoktrinasi militer, dan semangat Asia Timur Raya menjadi inti pelajaran.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran besar dari tujuan pendidikan pada masa Belanda ke tujuan militer pada masa Jepang, yang pada akhirnya mengubah secara mendasar identitas pendidikan rakyat. Dampak dari perubahan kebijakan ini tidak hanya terlihat pada sistem pembelajaran dan kurikulum, tetapi juga pada pola pikir serta kehidupan sosial masyarakat pribumi. Pada masa Belanda, pendidikan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial dan menyediakan tenaga kerja terampil tingkat rendah, sedangkan pada masa Jepang pendidikan dimanfaatkan sebagai sarana propaganda dan mobilisasi massa. Meskipun demikian, perubahan tersebut turut memberikan dampak positif berupa meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia, tumbuhnya kesadaran kebangsaan, serta munculnya semangat persatuan di kalangan siswa dan guru pribumi yang kemudian berkontribusi pada perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

1.6. Paradigma Penelitian



Keterangan:

—————> Garis Hubung
-----> Garis Hasil

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Kebijakan

Menurut Mc rae & Wilde Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah (MacRae, 1979).

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Sedangkan menurut (Agustino, 2003) "kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud".

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen legal-formal pemerintah yang berfungsi mengatur, mengarahkan, mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia secara sistematis. Keterlibatan kebijakan ini mencakup standar kurikulum, mekanisme pendanaan, peraturan tenaga kependidikan, hingga penjaminan mutu satuan pendidikan di seluruh

tingkatan.

Implementasi kebijakan tersebut menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan untuk menciptakan pemerataan akses maupun peningkatan kualitas layanan pendidikan nasional. Produk hukum ini menjadi landasan operasional bagi setiap lembaga pendidikan dalam menjalankan aktivitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman (Fadhli, 2017).

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan terencana yang dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi hambatan serta mencapai tujuan tertentu dalam skala luas. Karakteristik utama kebijakan terletak pada dampaknya yang harus dirasakan oleh masyarakat banyak, bukan individu semata, melalui keputusan yang terstruktur dan sistematis. Dalam ranah pendidikan, kebijakan tersebut diwujudkan sebagai instrumen hukum yang mengatur aspek krusial seperti kurikulum, pendanaan, dan mutu tenaga pendidik. Keberhasilan implementasi kebijakan ini pada akhirnya bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan demi menjamin pemerataan akses serta kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

2.1.2. Konsep *Volkschool*

Volkschool atau yang dikenal juga sebagai Sekolah Rakyat (SR) atau Sekolah Desa adalah institusi pendidikan rendah yang didirikan pada masa kolonial Belanda, khususnya setelah kebijakan Politik Etis diterapkan pada awal abad ke-20. Sekolah ini dibentuk dengan masa studi singkat umumnya hanya tiga tahun dan memiliki kurikulum yang sangat terbatas, berfokus pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*). Tujuan utama Belanda mendirikan *Volkschool* adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja rendahan yang murah dan efisien untuk perusahaan-perusahaan kolonial, seperti juru tulis, mandor, atau pegawai kantor tingkat bawah yang hanya memerlukan keterampilan minimal (Afandi, dkk, 2020).

Menurut Lestari (2021), kolonialisme Barat dilakukan melalui berbagai bentuk dominasi terhadap masyarakat di wilayah jajahan. Hal tersebut juga terlihat dalam kebijakan pendidikan kolonial Belanda melalui penerapan *Volkschool* bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. *Volkschool* merupakan sekolah rakyat yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan pendidikan dasar bagi masyarakat pribumi, terutama di wilayah pedesaan. Sekolah ini tersebar di berbagai daerah Hindia Belanda. Persebaran *Volkschool* lebih banyak ditemukan di wilayah dengan jumlah penduduk pribumi yang besar serta pusat administrasi kolonial. Keberadaan *Volkschool* banyak dijumpai di Pulau Jawa seperti Batavia, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya karena wilayah tersebut menjadi pusat perkembangan pendidikan kolonial pada masa itu (Gunawan & Suhaeni, 2022). *Volkschool* juga berkembang di beberapa wilayah luar Jawa sebagai bagian dari perluasan pendidikan dasar bagi masyarakat pribumi. Persebaran tersebut menunjukkan bahwa *Volkschool* menjadi salah satu bentuk pendidikan dasar dengan jangkauan yang cukup luas dibandingkan sekolah kolonial lainnya (Alzamani, 2022).

Ciri khas *Volkschool* terletak pada konsep pendiriannya yang bergantung pada partisipasi masyarakat setempat dari segi biaya pembangunan dan penyediaan guru. Penyelenggaraan sekolah tersebut berada di bawah subsidi serta pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Mutu dan kurikulum *Volkschool* sering dinilai rendah. Kebijakan *Volkschool* tetap memiliki posisi penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sekolah ini secara historis berfungsi sebagai gerbang awal modernisasi pendidikan bagi masyarakat pribumi di wilayah pedesaan. Perkembangannya berkontribusi pada peningkatan angka melek huruf di kalangan rakyat. Peran tersebut menjadi dasar terbentuknya Sekolah Dasar (SD) pada masa kemerdekaan (Saputri, 2019).

Meskipun didirikan dengan motif kolonial untuk menghasilkan pegawai murah dan terbatas oleh sistem diskriminatif (seperti dibedakan dari sekolah untuk kaum

elit pribumi atau Eropa). Menurut Perdana (2021), Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem pendidikan yang berbeda bagi tiap golongan masyarakat. Pendidikan untuk pribumi lebih diarahkan pada kemampuan dasar guna memenuhi kebutuhan pemerintahan kolonial. *Volkschool* telah menanamkan benih bagi kebangkitan nasional dan modernisasi pendidikan. Penyebaran kemampuan literasi dasar hingga ke pelosok desa melalui sekolah-sekolah tersebut secara tidak langsung membentuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesadaran lebih tinggi terhadap hak-hak mereka. Kelompok masyarakat ini memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari luar lingkungan mereka (Stroomberg, 2018). Dampak positif ini kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta dengan ideologi yang berfokus pada nasionalisme, mengubah fungsi pendidikan dari sekadar alat kepentingan kolonial menjadi modal intelektual transformatif yang mendorong kesadaran untuk melawan penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa (Syarif, 2019).

Volkschool merupakan lembaga pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan utama memberikan pendidikan dasar yang terbatas bagi masyarakat pribumi. Sekolah ini dirancang dengan kurikulum sederhana yang berfokus pada kemampuan baca, tulis, dan hitung, serta keterampilan praktis yang mendukung kebutuhan tenaga kerja kolonial. Meskipun secara struktural *Volkschool* bersifat diskriminatif dan membatasi mobilitas sosial pribumi, keberadaannya tetap memiliki arti penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. *Volkschool* menjadi pintu masuk awal modernisasi pendidikan di pedesaan dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan literasi serta tumbuhnya kesadaran sosial dan nasional di kalangan masyarakat pribumi.

2.1.3. Konsep Hindia Belanda

Hindia Belanda secara etimologi berasal dari kata *Dutch Indies* yang berarti Hindia Timur Belanda. Hal tersebut tercatat dalam dokumen *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di awal Tahun 1620-an dan merupakan salah

satu koloni Eropa di bawah kekuasaan imperium Belanda sejak 1 Januari 1800. Hal tersebut didasari oleh Undang-undang Dasar (*Grondwet*) Kerajaan Belanda Tahun 1992 dan amandemennya (1929, 1935, 1938). Menurut UUD tersebut, Hindia Belanda menjadi bagian integral dari Kerajaan Belanda yang mencakup wilayah-wilayah, berupa Negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao. Pemerintahan tertinggi (*Opperbestuur*) berada di tangan Raja (*Kroon*) yang dilaksanakan oleh Menteri Jajahan atas nama Raja, dengan bertanggung jawab kepada Parlemen Belanda (*Staten-Generaal*) (Laely, 2018). Wilayah Hindia Belanda mencakup pada sekelompok pulau yang membentang dari benua Asia hingga Australia.

Pulau-pulau tersebut terletak diantara 95° dan 141° Bujur Timur, serta 6° Utara dan 11° Selatan Khatulistiwa. Dengan pengecualian paa beberapa kawasan Timor yang menjadi bagian dari Portugal dan sebagian wilayah Borneo (Kalimantan) yang berada dibawah kekuasaan Inggris. Luas total kepulauan Hindia Belanda ialah 1.900.152 km² yang setara dengan setengah wilayah Eropa tanpa Rusia. Seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk ke dalam zona tropis, dimana iklim di area tersebut cukup seragam, dengan temperatur yang cukup tinggi menggambarkan wilayah tropis (Stroomberg, 2018).

Pemerintahan Hindia Belanda merupakan sistem kolonial yang terpusat, prosedural, dan berkasta yang dirancang untuk kepentingan Belanda, dengan Gubernur Jenderal sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dibantu oleh gubernur, residen, dan pejabat bertingkat lainnya. Sistem ini mengalami transisi dari pemerintahan tradisional berbasis adat istiadat dan hukum kerajaan menjadi struktur kolonial modern yang bertumpu pada Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1922 dan Undang-Undang Daerah 1922, di mana Hindia Belanda dianggap sebagai bagian integral dari Kerajaan Belanda bersama wilayah seperti Suriname dan Curaçao.

Struktur administratif yang melingkupi pemerintahan terdiri dari tingkatan pusat (Gubernur Jenderal), provinsi (Residen), *afdeeling* (Asisten Residen), *onderafdeling* (Controleur dan Bupati), *distrik* (Wedana), *onderdistrik* (Camat), hingga desa (Lurah), dengan pembagian wilayah menjadi gubernemen (langsung dikuasai Belanda) dan swapraja (dikuasai oleh raja pribumi yang tunduk pada Belanda). Pemerintah kolonial mempertahankan unsur monarki absolut dari sistem tradisional sekaligus dengan mereformasi jabatan lokal seperti Gallarang menjadi fungsionaris birokrasi kolonial untuk mendukung terjadinya eksploitasi ekonomi dan pengawasan politik.

Pengaruh sistem tersebut menyebabkan terjadinya transformasi struktural dari politik dan ekonomi tradisional menuju model kolonial modern, termasuk pola paternalistik yang menjiwai birokrasi kerajaan lama, serta kebijakan seperti *Secentralisatie* Wet 1903 yang memperkuat desentralisasi terbatas demi efisiensi kolonial. Birokrasi kolonial berfungsi sebagai instrumen pengawasan wilayah jajahan untuk menghasilkan surplus ekonomi bagi Belanda, dengan hierarki yang menempatkan masyarakat pribumi dan orang asing di bawah otoritas Gubernur Jenderal (Laely, 2018).

Hindia Belanda merupakan wilayah kolonial yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, birokratis, dan hierarkis. Struktur pemerintahan kolonial dirancang untuk mendukung kepentingan ekonomi dan politik Belanda melalui pengawasan ketat terhadap wilayah dan penduduk pribumi. Dalam sistem ini, pendidikan dijadikan sebagai salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas kolonial dan mendukung eksploitasi sumber daya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan di Hindia Belanda, termasuk *Volkschool*, tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang memperkuat struktur

kolonial dan mempertahankan ketimpangan antara penguasa dan masyarakat pribumi

2.1.4. Teori Gerak Sejarah

Teori gerak sejarah merupakan salah satu pendekatan penting dalam filsafat sejarah modern yang menekankan bahwa sejarah adalah proses yang hidup dan terus bergerak, bukan sekadar kumpulan fakta masa lalu. Pemikiran ini dikembangkan oleh R. G. Collingwood melalui karyanya *The Idea of History* (1946). Menurut Collingwood, sejarah merupakan usaha manusia untuk memahami cara berpikir dan tindakan manusia pada masa lalu dengan menyusunnya kembali secara logis berdasarkan kondisi sosial dan zamannya. Collingwood menegaskan bahwa peristiwa sejarah tidak dapat dipahami hanya dari peristiwanya saja, tetapi juga harus melihat pemikiran, kondisi sosial, dan latar belakang yang memengaruhi terjadinya peristiwa tersebut.

Setiap periode sejarah memiliki “jiwa zaman” (*spirit of the age*) yang mendorong terjadinya perubahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Sejarah dipahami sebagai proses yang terus bergerak mengikuti perubahan ide, kebutuhan, dan tindakan manusia dalam setiap masa. Perubahan tersebut terjadi melalui hubungan yang saling memengaruhi antara masa lalu dan masa kini sehingga membentuk arah perkembangan sejarah manusia secara berkelanjutan.

Bagi Collingwood, sejarah tidak hanya mencakup apa yang terjadi, tetapi juga alasan dan pemikiran di balik terjadinya suatu peristiwa. Sejarah dipahami bukan sekadar kumpulan peristiwa, melainkan juga cara manusia memahami dan memberi makna terhadap peristiwa tersebut. Collingwood menolak pandangan bahwa sejarah hanya ditentukan oleh hubungan sebab-akibat yang sederhana. Menurutnya, sejarah merupakan hasil dari tindakan sadar manusia yang berlangsung dalam proses perubahan secara terus-menerus.

Selain menekankan aspek perubahan dan keberlanjutan, teori gerak sejarah juga menempatkan manusia dan kebijakan sebagai bagian aktif dalam proses sejarah, bukan sekadar objek dari suatu peristiwa. Setiap kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, lahir dari pertimbangan ideologis, politik, dan kepentingan penguasa pada masanya. Dengan demikian, kebijakan *Volkschool* tidak dapat dipahami hanya sebagai rangkaian perubahan administratif, tetapi juga sebagai hasil dari pilihan sadar pemerintah kolonial dan pendudukan militer dalam mengatur masyarakat. Teori gerak sejarah membantu menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan tidak selalu bermakna kemajuan bagi masyarakat, melainkan sering kali menjadi strategi penguasa untuk mempertahankan kontrol dalam situasi politik yang terus berubah.

Teori gerak sejarah juga memungkinkan peneliti melihat dinamika sebab-akibat jangka panjang dari suatu kebijakan. Dalam konteks *Volkschool* Tahun 1941–1946, kebijakan pendidikan yang pada awalnya bersifat kolonial dan diskriminatif justru menghasilkan dampak yang tidak sepenuhnya direncanakan oleh penguasa, seperti meningkatnya kemampuan literasi dan tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat pribumi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sejarah bersifat dinamis dan dapat menghasilkan perubahan sosial di luar tujuan awal penguasa. Kebijakan pendidikan yang awalnya ditujukan untuk mempertahankan dominasi kolonial pada akhirnya turut berkontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran sosial dan nasionalisme yang mengarah pada kemerdekaan Indonesia. Teori gerak sejarah menjadi kerangka analisis yang penting untuk memahami perubahan fungsi *Volkschool*, dari alat kekuasaan kolonial menjadi bagian dari fondasi pendidikan nasional Indonesia.

Dalam penelitian “Kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda Tahun 1941–1946,” teori gerak sejarah relevan digunakan karena periode tersebut menunjukkan perubahan sistem pendidikan yang dipengaruhi pergantian kekuasaan politik.

Tahun 1941 menandai akhir kekuasaan Hindia Belanda sebelum masuknya pendudukan Jepang pada Tahun 1942. Tahun 1945-1946 menjadi masa transisi menuju kemerdekaan Indonesia. Setiap periode memiliki orientasi pendidikan yang berbeda. Masa kolonial Belanda berorientasi pada kepentingan kolonial dan pengendalian masyarakat pribumi. Masa pendudukan Jepang menekankan nasionalisme Asia, disiplin, serta pelatihan tenaga kerja. Masa awal kemerdekaan mulai menegaskan semangat kebangsaan dan pembentukan identitas nasional Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari proses gerak sejarah yang terus berubah mengikuti dinamika politik, sosial, dan kepentingan penguasa pada setiap periode.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan kajian yang hendak dibahas, penelitian dengan topik sejenis yang relevan pada penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi Fika Ardhillah Tahun 2022 berjudul “Sejarah Pendidikan Sekolah Rakyat (*Volkschool*) Pada Masa Kolonial Belanda Di Aceh” di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini mengkaji secara khusus kehadiran dan perkembangan Sekolah Rakyat atau *Volkschool* di Aceh pada masa kolonial Belanda dengan menekankan pada aspek historis, sosial, dan kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian *Volkschool* di Aceh tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya memberikan pendidikan dasar bagi rakyat pribumi, melainkan juga sebagai alat kontrol sosial dan politik Belanda. Pendidikan dasar yang diberikan terbatas pada kemampuan baca, tulis, dan hitung, serta diarahkan untuk mencetak tenaga kerja murah yang dapat menunjang kepentingan kolonial. Keberadaan *Volkschool* membuka akses pendidikan dasar yang lebih luas bagi masyarakat Aceh. Dampak tersebut

2. turut berpengaruh dalam proses tumbuhnya kesadaran nasional. Kelebihan skripsi ini terletak pada fokus kajian wilayah Aceh. Fokus tersebut memberikan gambaran lebih spesifik mengenai dinamika pendidikan kolonial di daerah tersebut. Ruang lingkup penelitian masih terbatas pada periode kolonial Belanda. Kajian lanjutan mengenai keberlangsungan *Volkschool* belum dibahas secara mendalam. Pembahasan mengenai *Volkschool* pada masa pendudukan Jepang juga belum tercakup.
3. Skripsi Muhammad Arfani Ramadhan Tahun 2023 berjudul “Sejarah Perkembangan *Volkschool* (Sekolah Desa) Di Sulawesi Bagian Selatan Pada Tahun 1907-1941” di Universitas Hasanudin. Penelitian tersebut membahas secara rinci awal pendirian, sistem pengelolaan, hingga perkembangan *Volksschool* di wilayah Sulawesi Selatan mulai dari fase awal kehadirannya pada Tahun 1907, masa pertumbuhan pesat, hingga periode perlambatan pada Tahun 1941. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan *Volksschool* sangat dipengaruhi oleh faktor pembiayaan, subsidi pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Skripsi ini menjadi rujukan penting karena memberikan gambaran mendalam tentang *Volkschool* di daerah *Celebes Onderhoorigheden*. Penelitian tersebut membatasi kajian sampai Tahun 1941. Periode tersebut berada sebelum berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda akibat kedatangan Jepang. Ruang penelitian masih terbuka pada kebijakan *Volkschool* dalam periode 1941-1946. Periode tersebut mencakup akhir kekuasaan kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, serta fase awal kemerdekaan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, maka ruang lingkup penelitian yang akan peneliti kembangkan mencakup:

- 1) Objek Penelitian : Kebijakan *Volkschool* di Hindia-Belanda
- 2) Subjek Penelitian : *Volkschool*
- 3) Tempat Penelitian : -Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Website *Delpher*
Website *University Leiden*
- 4) Waktu Penelitian : 2025
- 5) Temporal Penelitian : 1941-1946
- 6) Bidang Penelitian : Sejarah

3.2. Metode Penelitian

Penelitian didefinisikan dalam dunia akademik sebagai kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, membuktikan, atau mengembangkan pengetahuan secara sistematis dan metodologis. Prt melalui pengumpulan dan interpretasi data. Penelitian adalah lebih dari sekadar mencari informasi, itu adalah proses yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah sehingga hasilnya dapat diandalkan dan diakui dalam dunia keilmuan (Kerlinger, 2006). Penelitian adalah upaya untuk mengungkap kebenaran secara logis dan sistematis melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis.

“metode” berasal dari kata Yunani “*methodos*”, yang berarti “cara” atau “jalan menuju suatu tujuan”. Dalam konteks akademik, metode adalah prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian (Hadi, 2004). Metodologi penelitian merupakan upaya penyelidikan serta pemecahan suatu masalah melalui penggunaan pendekatan yang cermat dan teliti. Data dianalisis secara sistematis dan objektif. Proses tersebut menghasilkan penarikan kesimpulan yang terstruktur (Dawis dkk., 2023).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode historis. Menurut Pratama (2021), metode historis digunakan karena penelitian mengambil objek dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut Sumargono (2021), metode sejarah merupakan suatu cara untuk merekonstruksikan peristiwa masa lampau melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dan menjelaskan secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda Tahun 1941–1946. Menurut (Kuntowijoyo, 2003), pendekatan historis bukan sekadar merekam kejadian masa lalu, tetapi juga memberi makna terhadap peristiwa tersebut melalui interpretasi kritis terhadap sumber-sumber yang ada.

Peneliti menggunakan metode historis karena data yang mereka peroleh akan diuji dan dianalisis secara kritis melalui peninggalan masa lalu. Mereka kemudian akan menuliskan temuan mereka berdasarkan apa yang mereka ketahui. Proses penelitian terdiri dari empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut, sesuai dengan langkah-langkah di atas:

3.2.1. Heuristik

Dalam penelitian sejarah, tahap pertama adalah mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam

penulisan sejarah, heuristik adalah proses pengumpulan sumber. ‘Heuristik’ berasal dari bahasa Yunani *heurishein* yang berarti “memperoleh” (Abdurrahman, 2007). Pengumpulan sumber yang dilakukan untuk mencari tau hubungan dengan objek penelitian dan juga untuk mengakses berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Pencarian sumber tertulis dilakukan untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini serta untuk menentukan hubungannya dengan subjek penelitian. Peneliti memeriksa kebenaran sumber tertulis dengan membandingkannya dengan sumber lain yang memiliki masalah yang sama dalam tulisannya. Pencarian peneliti pada sumber-sumber yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber asli yang langsung berasal dari masa lalu atau peristiwa yang diteliti, tanpa melalui perantara atau interpretasi pihak lain. Sumber ini sangat penting, karena memberikan bukti autentik tentang kejadian sejarah. Sumber data primer dalam penelitian sejarah meliputi dokumen asli, artefak, catatan resmi, surat, prasasti, wawancara dengan saksi sejarah, dan benda-benda peninggalan yang berasal langsung dari masa yang diteliti (Kuntowijoyo, 2009.) Beberapa sumber primer yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, adalah dokumen-dokumen yang menunjukkan tentang “Kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda Tahun 1941-1946”, pada tahapan ini peneliti mendapatkan sumber primer diantaranya:

1. Arsip Belanda peta mengenai posisi *Volkschool* dalam sistem pendidikan kolonial.
2. Arsip Surat kabar Indonesia penataan kota yang melibatkan *Volkschool* Tahun 1941.
3. Arsip Surat kabar Belanda perpindahan dan penugasan guru oleh pemerintah kolonial pada Tahun 1941.
4. Arsip buku Belanda penjelasan pengajaran bahasa di *Volkschool* Tahun

- 1941.
5. Arsip Surat kabar Belanda *Volkschool* menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan kejuruan untuk membentuk tenaga kerja pribumi Tahun 1941.
6. Arsip Surat kabar Belanda tentang rencana menjadikan *Volkschool* sebagai sekolah delapan tahun Tahun 1941.
7. Arsip Surat kabar Indonesia Perubahan nama dalam bahasa Nippon Tahun 1941.
8. Arsip Surat kabar Indonesia pelajaran Bahasa Nippon Tahun 1942.
9. Arsip Surat kabar Indonesia Pemberitahuan dilarang pakai bahasa belanda Tahun 1942.
10. Arsip Surat kabar Indonesia Pembukaan lapangan pendidikan Tahun 1942.
11. Arsip Surat kabar Indonesia pemberitahuan sekolah pertukangan Tahun 1942.
12. Arsip Surat kabar Indonesia Sekolah guru perempuan Tahun 1942.
13. Arsip Surat kabar Indonesia mengenai pembukaan sekolah sekolah Tahun 1942.
14. Arsip Surat kabar Indonesia pemberitahuan aturan sekolah pertukangan Tahun 1942.
15. Arsip Surat kabar Indonesia pemberitahuan sekolah yang sudah dibuka Tahun 1942.
16. Arsip Surat kabar Indonesia 50.000 orang menuntut ilmu pengetahuan Tahun 1943.
17. Arsip Surat kabar Indonesia Pendidikan rakyat diperluas Tahun 1943.
18. Arsip Surat kabar Indonesia Kursus bahasa Nippon bagi kaum putri Tahun 1943.
19. Arsip Surat kabar Indonesia Pemberantasan buta huruf Tahun 1943.
20. Arsip Surat kabar Indonesia memberantas buta huruf Tahun 1943.
21. Arsip Surat kabar Indonesia pemuda pemudi buta huruf Tahun 1944.

22. Arsip Surat kabar Indonesia pembukaan sekolah bahasa Nippon Tahun 1944.
23. Arsip Surat kabar Indonesia pendidikan seluruh Jawa maju pesat Tahun 1944.
24. Arsip Surat kabar Indonesia pembukaan sekolah-sekolah baru Tahun 1944.
25. Arsip Surat kabar Indonesia siaran pendidikan rakyat dari radio Jakarta Tahun 1945.
26. Arsip Surat kabar Indonesia Ujian menjadi guru guru dan guru bantu Tahun 1945.
27. Arsip Surat kabar Indonesia usaha memperbaiki nasib guru-guru sekolah rakyat Tahun 1945.
28. Arsip Surat kabar Indonesia pertandingan bahasa Nippon Tahun 1945.
29. Arsip Surat kabar Indonesia pendidikan pertama dan menengah diperkuat Tahun 1945.
30. Arsip Surat kabar Indonesia peraturan sekolah rakyat Tahun 1945.
31. Arsip Surat kabar Indonesia Satu setengah juta murid akan dikerahkan untuk pertanian Tahun 1945.
32. Arsip Surat kabar Indonesia kewajiban guru dimasa perang Tahun 1945.
33. Arsip Surat kabar Indonesia panggilan tenaga guru Tahun 1946.
34. Arsip surat kabar Indonesia pendidikan ditinjau dari sudut para psikologi Tahun 1946.
35. Arsip Surat kabar Indonesia *Volks Universiteit* dibuka Tahun 1946.
36. Arsip Surat kabar Indonesia tentang maklumat sekolah partikelir Tahun 1946.

2.Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berasal dari interpretasi, analisis, atau pengolahan data primer oleh pihak lain. Sumber sekunder ini biasanya berupa

karya tulis seperti buku sejarah, artikel, atau penelitian sebelumnya yang membahas peristiwa atau masa yang sama, namun tidak langsung berasal dari masa tersebut. sumber sekunder penting untuk memberikan konteks, penjelasan, dan analisis tambahan terhadap data primer, serta membantu peneliti memahami latar belakang dan interpretasi peristiwa sejarah. Adapun beberapa sumber sekunder yang peneliti dapatkan, sumber sekunder diantaranya:

1. Buku yang ditulis oleh Van Der Wal (1977), “Pendidikan di Indonesia Tahun 1900-1940”.
2. Buku yang ditulis oleh Van Der Wal (1963), “*Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940: een bronnenpublikatie= Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940*”.
3. Buku yang ditulis oleh Vlekke (1945), “*The story of the Dutch East Indies*”. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda Tahun 1941-1946.

3.2.2. Kritik Sumber

Tahap berikutnya melibatkan pengumpulan informasi sejarah yang kritis. Pada titik ini, semua sumber yang tersedia diperiksa untuk memastikan kredibilitasnya. Sumber dikritik baik secara internal maupun eksternal. Tujuan kritik sumber ini adalah untuk mengidentifikasi sumber mana yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini. Setelah mendapatkan sumber pada tahap heuristik, penulis melanjutkan dengan melakukan kritik sumber, juga dikenal sebagai verifikasi sumber. Pada fase ini, peneliti dihadapkan pada pilihan antara benar dan salah, kemungkinan, dan keraguan, Kritik sumber dibagi menjadi dua bagian yaitu kritik eksternal dan internal, seperti yang disebutkan sebelumnya. Kritik sumber ini penting karena sangat terkait dengan tujuan sejarawan untuk menemukan kebenaran. Kritik internal berfokus pada isi, atau sumber sejarah, sedangkan kritik eksternal berfokus pada aspek luarnya (Sjamauddin, 2007).

3.2.3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahap di mana peneliti menafsirkan data yang telah diverifikasi atau diuji kebenarannya untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dan apa artinya dalam konteks waktu dan ruang tertentu. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data dan fakta yang telah mereka peroleh sebelum menuangkannya ke dalam tulisan. Setelah itu menghubungkan hal tersebut untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai kebijakan *Volkschool* di Indonesia Tahun 1941-1946 (Kuntowijoyo, 2003).

3.2.4 Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir dalam tahapan penelitian sejarah, historiografi maksudnya adalah penulisan sejarah. Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama dalam memahami sejarah. Tahap penulisan menuntut sejarawan untuk mengerahkan seluruh daya pikirannya. Proses tersebut mencakup keterampilan teknis penggunaan kutipan dan catatan. Proses tersebut menekankan penggunaan pemikiran kritis serta kemampuan analisis. Sejarawan dituntut menghasilkan suatu sintesis atau perpaduan dari keseluruhan hasil penelitian atau penemuan. Sintesis atau perpaduan tersebut diwujudkan dalam bentuk penulisan yang utuh (Sjamsuddin, 2007).

Historiografi ialah usaha untuk mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk tulisan, baik dalam buku atau artikel maupun perkuliahan sejarah, dan pada tahap ini penulis menyusun data-data yang telah melewati beberapa tahap dan menghasilkan rekonstruksi peristiwa sejarah yang kronologis dan sesuai dengan penelitian “kebijakan *Volkschool* di Indonesia Tahun 1941-1946” (Ismaun, 2005).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya (Subagyo, 2006). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa cara, meliputi:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data primer dilakukan dengan meninjau arsip resmi tentang sejarah kebijakan *Volkschool* di Hindia-Belanda dari Tahun 1941 hingga 1946. Arsip ini diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku sejarah, jurnal, artikel ilmiah, arsip yang membahas tentang *Volkschool* pada periode 1941-1946. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk memahami konteks sosial, politik, dan pendidikan pada masa tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencarian buku untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Berikut beberapa buku dan jurnal yang akan menjadi sumber data penelitian ini:

- a. Buku yang ditulis oleh Van Der Wal (1997), “Pendidikan di Indonesia Tahun 1900-1940”.
- b. Buku yang ditulis oleh Van Der Wal(1963), “*Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940*”.
- c. Buku yang ditulis oleh Vlekke (1945), “*The story of the dutch east indies*”.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pendekatan metodologis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai bentuk dokumen, baik primer maupun sekunder, yang berfungsi sebagai sumber bukti utama dalam penelitian, proses penerapan teknik dokumentasi terdiri dari beberapa tahap utama. Pertama, identifikasi dan pengumpulan dokumen melalui sumber seperti

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi arsip, dan foto yang mendukung pemahaman konteks sejarah kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda Tahun 1941-1946.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mencakup proses pengumpulan data secara sistematis, penyaringan atau reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan, analisis yang terarah, serta penerapan pendekatan metodis guna memperoleh kesimpulan yang terverifikasi secara mendalam. Menurut Kuntowijoyo (2003). Analisis data merupakan kegiatan pencarian dan penyusunan data secara sistematis. Data diperoleh melalui catatan lapangan serta dokumentasi. Proses analisis mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu. Data diuraikan menjadi satuan-satuan makna. Proses selanjutnya meliputi penyusunan sintesis serta pembentukan pola. Aspek penting diseleksi untuk kepentingan kajian. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian mudah dipahami. Penggunaan teknik analisis data yang tepat berperan dalam peningkatan kualitas penelitian. Validitas dan reliabilitas data menjadi lebih kuat. Proses generalisasi serta pemahaman mendalam terhadap fenomena penelitian dapat tercapai. Pemahaman terhadap berbagai jenis teknik analisis menjadi kebutuhan penting bagi setiap peneliti.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis historis. Teknik ini berfungsi untuk menelaah, menafsirkan, dan memahami data yang berkaitan dengan masa lalu. Analisis historis lazim digunakan dalam penelitian sejarah guna menelusuri peristiwa, perkembangan pemikiran, kebijakan, atau lembaga dengan memanfaatkan sumber-sumber sejarah seperti arsip, surat kabar, maupun literatur lainnya. Gottschalk (1985) dalam karyanya *Understanding History* menjelaskan bahwa analisis historis memerlukan pendekatan ilmiah, di mana peneliti tidak hanya berfokus pada pengumpulan fakta, tetapi juga menghubungkan berbagai peristiwa secara logis dan kronologis untuk memperoleh pemahaman yang utuh.

Tujuan utama teknik analisis data historis berupa rekonstruksi fakta masa lalu secara objektif serta sistematis. Hasil rekonstruksi tersebut dapat dipahami dalam konteks yang relevan. Tahap analisis data dikenal sebagai interpretasi. Tahap tersebut menuntut peneliti melakukan penafsiran, pengaitan, serta rekonstruksi sumber-sumber. Sumber-sumber tersebut disusun menjadi narasi yang berkaitan dengan objek penelitian (Kartodirdjo, 1993). Penerapan tahapan metode sejarah memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai “Kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda Tahun 1941-1946”.

1. Reduksi Data

Proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi ini membantu mengeliminasi data yang kurang penting atau tidak terkait sehingga data menjadi lebih mudah dikelola dan dianalisis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi dan disederhanakan dengan cara memilah informasi yang relevan dan signifikan terhadap fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah akan disingkirkan agar analisis lebih terarah.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik yang memudahkan pemahaman dan interpretasi. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan kronologi peristiwa, kebijakan *Volkschool* di Hindia Belanda Tahun 1941-1946.

3. Verifikasi dan Validasi Data

Data yang disajikan diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (arsip dan literatur) untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi agar dapat dipertanggung jawabkan.

4. Interpretasi Data

Interpretasi adalah tahap di mana peneliti menafsirkan data yang telah diverifikasi atau diuji kebenarannya untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dan apa artinya dalam konteks waktu dan ruang tertentu. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data dan fakta yang telah mereka peroleh sebelum menuangkannya ke dalam tulisan. Setelah itu menghubungkan hal tersebut untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai kebijakan *Volkschool* di Indonesia Tahun 1941-1946(Kuntowijoyo,2003).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada masa Belanda, kebijakan *Volkschool* dirancang sebagai bagian dari sistem pendidikan kolonial yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan politik, kurikulum dibuat sederhana dengan fokus pada kemampuan dasar serta keterampilan praktis sehingga masyarakat pribumi hanya dipersiapkan sebagai tenaga kerja rendahan, kondisi ini berdampak pada terbentuknya kesenjangan pendidikan sekaligus memunculkan kesadaran awal di kalangan pribumi tentang pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan

Pada masa Jepang, sistem *Volkschool* mengalami perubahan menjadi Sekolah Rakyat dengan penghapusan diskriminasi, penggunaan bahasa Jepang serta penanaman nilai disiplin dan semangat militer menjadi bagian utama kurikulum, perubahan ini terjadi sebagai akibat dari kepentingan Jepang dalam mobilisasi massa dan propaganda perang, kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi pendidikan serta tumbuhnya semangat kolektif dan kesadaran kebangsaan di kalangan siswa dan guru pribumi

Pada awal kemerdekaan, sistem pendidikan yang diwarisi dari masa Jepang dimanfaatkan sebagai dasar pembentukan pendidikan nasional, keterbatasan sarana dan kondisi pasca perang tidak menghalangi pemanfaatan sekolah sebagai sarana penanaman nilai nasionalisme, hal ini merupakan akibat dari meningkatnya kesadaran dan pengalaman pendidikan pada masa sebelumnya, dampaknya

terlihat pada peran sekolah dalam membentuk identitas bangsa serta menjadi fondasi awal bagi perkembangan sistem pendidikan Indonesia yang lebih merata dan berorientasi pada kepentingan nasional

5.2 Saran

1. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini memberikan pengalaman penting bagi peneliti dalam memanfaatkan sumber primer dan sumber sekunder pada penelitian sejarah. Proses penelitian mendorong penulis untuk terus mengembangkan kemampuan kritik sumber, keterampilan membaca arsip kolonial, serta pemahaman terhadap konteks sosial politik masa Hindia Belanda dan pendudukan Jepang. Selain itu, penulis diharapkan dapat memperluas wawasan historiografi pendidikan sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih tajam, kritis, dan komprehensif pada masa mendatang. Peningkatan ketelitian, kedisiplinan, dan keterampilan metodologis juga diharapkan dapat mendukung lahirnya karya ilmiah yang lebih matang serta berkontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah pendidikan di Indonesia.

2. Bagi Pembaca

Skripsi ini dapat dijadikan rujukan bagi pembaca untuk memahami pembentukan pengalaman belajar masyarakat pribumi melalui kebijakan pendidikan kolonial. Perubahan kebijakan pendidikan pada masa transisi kekuasaan 1941-1946 juga dapat dipahami melalui kajian ini. Pembaca diarahkan untuk memandang *Volkschool* bukan semata sebagai institusi pendidikan dasar, melainkan sebagai alat politik yang mencerminkan dinamika kekuasaan pada masanya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan awal bagi kajian lanjutan mengenai hubungan pendidikan, kolonialisme, dan pembentukan identitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Koran dan Majalah

- Asia Raya*. 1942. *Pelajaran bahasa Nippon*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1942. *Pembukaan sekolah-sekolah*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1942. *Pemberitahuan sekolah yang sudah dibuka*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1942, 15 September. *Aturan sekolah pertukangan*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1942. *Pemberitahuan dilarang pakai bahasa Belanda*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1942. *Pemberitahuan sekolah pertukangan*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1942. *Perubahan nama dalam bahasa Nippon*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1942. *Pembukaan lapangan pendidikan*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1942. *Sekolah guru perempuan*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1943. *Pendidikan rakyat diperluas*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1943. *50.000 orang menuntut ilmu pengetahuan*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1943. *Kursus bahasa Nippon bagi kaum putri*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1943. *Pemberantasan buta huruf*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1943. *Memberantas buta huruf*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1944. *Pembukaan sekolah-sekolah baru*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1944. *Pembukaan sekolah bahasa Nippon*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1944. *Pemuda pemudi buta huruf*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Asia Raya*. 1944. *Siaran pendidikan rakyat dari Radio Jakarta*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Asia Raya. 1944. *Pendidikan seluruh Jawa maju pesat*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Asia Raya. 1945. *Kewajiban guru di masa perang*. Leiden University.

Asia Raya. 1945. *Ujian menjadi guru-guru dan guru bantu*. Leiden University.

Asia Raya. 1945. *Memperluas sekolah-sekolah*. Leiden University.

Asia Raya. 1945. *Peraturan sekolah rakyat*. Leiden University.

Asia Raya. 1945. *Satu setengah juta murid akan dikerahkan untuk pertanian*. Leiden University.

Asia Raya. 1945. *Usaha memperbaiki nasib guru-guru sekolah rakyat*. Leiden University.

Asia Raya. 1945. *Pendidikan pertama dan menengah diperkuat*. Leiden University.

Asia Raya. 1945. *Pertandingan bahasa Nippon*. Leiden University.

Asia Raya. 1946. *Panggilan tenaga guru*. Leiden University.

Asia Raya. 1946. *Pendidikan ditinjau dari sudut para psikologi*. Leiden University.

Asia Raya. 1946. *Maklumat sekolah partikelir*. Leiden University.

Asia Raya. 1946. *Volks Universiteit dibuka*. Leiden University.

De Indische Courant. 1941. *Arsip surat kabar penataan kota yang melibatkan Volkschool*. Delpher.

De Standaard. 1941. *Arsip tentang rencana menjadikan Volkschool sebagai sekolah delapan tahun*. Delpher.

De Sumatera Post. *Volkschool menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan kejuruan untuk membentuk tenaga kerja pribumi*. Delpher.

Arsip

Bataviaasch Nieuwsblad. 1941. *Arsip surat kabar perpindahan dan penugasan guru oleh pemerintah kolonial* [Arsip surat kabar]. Delpher.

Bataviaasch Nieuwsblad. *Peta mengenai posisi Volkschool dalam sistem pendidikan kolonial*. Delpher.

Wels, B. 1941. *Arsip buku penjelasan pengajaran bahasa di Volkschool* [Buku]. Schoolland, Delpher.

Buku dan Jurnal

Bass, B. M. 1985. *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: Free Press.

Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. 2020. Pendidikan pada masa pemerintah kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900–1930. *Jurnal Artefak*, 7(1).

Agustino, L. 2003. Analisis Kebijakan Pembangunan Di Desa Suligi Kecamatan

- Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Alzamani, M. Z. 2022. Perkembangan Pendidikan di Batavia pada Masa Kolonialisme Tahun 1901–1942. *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1).
- Ardhillah, F., Matsyah, A., & Ahmad, M. Y. 2022. History of public school education (*Volkschool*) in the Dutch colonial period in Aceh. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 3(2).
- Arum, S., & Jasyusman, I. 2023. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 6(1).
- Collingwood, R. G. 1946. *The idea of history*. Oxford University Press.
- Dawis, A. M., dkk. 2023. *Pengantar metodologi penelitian*. Get Press Indonesia.
- Ekwandari, Y. S., dkk. 2022. Irigasi dan pendidikan politik etis di Kota Metro. *Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2).
- Fadhli, M. 2017. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Satu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2).
- Gunawan, R. P. T., & Suhaeni, E. 2022. Jejak Langkah Pendidikan Masa Kolonial dari Muka *Volkschool*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(3).
- Hadi, S. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.
- Ismaun. 2005. *Sejarah sebagai ilmu*. Historia Utama Press.
- Kartodirdjo, S. 1990. *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia: Suatu alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kerlinger, F. N. 2006. *Foundations of behavioral research*. Orlando, FL: Holt, Rinehart and Winston.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniawan, A., Prameswari, A., & Ekwandari, Y. S. 2022. Irigasi dan pendidikan politik etis di Kota Metro. *Jurnal Ilmu Sosial dan Studi (IJSS)*, 5(2).
- Lestari, N. I. 2021. Pemberontakan Boxer sebagai gerakan anti bangsa asing 1899–1901. *PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 9(1).
- MacRae, D. 1979. *Policy analysis for public decisions*. North Scituate, MA: Duxbury Press.
- Nugroho, B. 2019. Transformasi pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*.
- Perdana, Y., Sumargono, & Rachmedita, V. 2019. Integrasi sosiokultural siswa dalam pendidikan multikultural melalui pembelajaran sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2).
- Pratama, R. A., Maskun, & Lestari, N. I. 2019. Dinamika pelajaran Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 pada jenjang SMK/MAK. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2).
- Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Saputri, E. D. 2019. Perkembangan sekolah rakyat. *Jurnal Artefak*, 4(3).
- Sjamsuddin, H. 2007. *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Stroomberg, J. 2018. *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta:Indonesia Research Center for Social Development.
- Subagyo, J. 2006. *Metode penelitian: Dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suherman, A., & Bastaman, W. W. 2019. Perkembangan sekolah rakyat (*Volkschool*) di Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten Tahun 1940–1964. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 2(2).
- Sumargono. 2021. Metodologi penelitian sejarah. Klaten: Lakeisha.
- Suryadinata, L. 2010. Education and colonial legacy in Indonesia. *Journal of Indonesian Social History*.
- Susanto, E. 2022. Transisi pendidikan dari kolonial ke nasional: Peran *Volkschool* 1941–1946. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*.
- Syarif, M. 2019. Politik Etis pemerintah kolonial Hindia Belanda dan pengaruhnya terhadap pesantren. *Inovatif*, 5(1).
- Tanaka, H. 2019. Propaganda militer Jepang dalam kurikulum sekolah Hindia Belanda. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Wahab, S. A. 2014. *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Malang: UMM Press.
- van der Wal, S. L. 1963. *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940: een bronnenpublikatie. Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940*. Groningen: J.B Wolters.
- Van der Wal, S. L. 1977. *Pendidikan di Indonesia 1900-1940 (Buku II)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Vlekke, B. H. 1945. *The Story of the Dutch East Indies*. Harvard University Press.